



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : MULYANTO
- Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- NHK : 187069

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 515.000.000

- Tanah Seluas 1804 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/100 m2 di MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- Tanah Seluas 1675 m2 di JEPARA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 31.000.000

- MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 167.952.137

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 123.696.863

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 837.649.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 837.649.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.